

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi awalnya adalah hutan lindung yang memiliki fungsi sebagai sumber resapan air, habitat bagi banyak flora dan fauna, serta kawasan penyangga bagi kehidupan masyarakat di sana. Gunung Tumpang Pitu juga sebagai benteng alam penghalau terpaan angin, penahan longsor, bahkan pada peristiwa bencana tsunami 1994 secara tidak langsung Gunung Tumpang Pitu telah menyelamatkan masyarakat, karena mampu menghalau terjangan gelombang tsunami. Manfaat lain dari Gunung Tumpang Pitu juga sangat vital bagi masyarakat di sana yang secara mayoritas beprofesi sebagai petani, nelayan dan penggiat pariwisata. Para petani memanfaatkan Gunung Tumpang Pitu sebagai sumber pengairan areal sawah mereka, sementara para nelayan memanfaatkan Gunung Tumpang Pitu sebagai penanda jarak ketika melaut.

Selain fungsi dan manfaat yang sangat vital bagi banyak kehidupan, Gunung Tumpang Pitu ternyata juga menyimpan kandungan mineral logam emas yang membuatnya diburu banyak perusahaan industri ekstraktif pertambangan. Tercatat sejak tahun 1991, banyak perusahaan yang mengajukan izin eksplorasi di gunung-gunung pesisir selatan Banyuwangi kepada pemerintah. Pada tahun 1991 sampai 1994 izin diberikan kepada PT Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari tahun 1994 sampai 1997. Kemudian, Hakman Group JV bersama Golden Valley Mines dan Placer Dome

pada tahun 1997-2000. Namun, eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut hanya dalam skala kecil.

Pada tahun 2006, pemerintah daerah memberikan izin operasi pertambangan kepada PT Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) untuk memulai eksplorasi dalam skala yang lebih besar. Sampai pada tahun 2012, izin tersebut dialihkan kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) pada tahun 2012 yang sekaligus menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.826/Menhut-II/2013.

Pemerintah daerah hingga pusat ternyata menilai bahwa hadirnya pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu merupakan aset penting untuk meningkatkan perekonomian lokal hingga nasional, sehingga pemerintah sangat ramah terhadap investor dan mendukung segala aktivitas pertambangan emas. Pemerintah juga terbukti telah memberikan berbagai izin usaha pertambangan dengan mudah kepada perusahaan pertambangan emas, dan tidak melibatkan publik secara partisipatif.

Sementara di lain sisi, masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu yang sudah memiliki ikatan memori dan merasakan segala manfaat Gunung Tumpang Pitu selama ratusan tahun, tentu tidak ingin Gunung Tumpang Pitu dirusak oleh aktivitas pertambangan. Sebagian besar masyarakat di sana tidak membutuhkan pertambangan, karena sudah hidup sejahtera sebagai petani, nelayan dan penggiat pariwisata yang semuanya berkaitan dengan Gunung Tumpang Pitu sebagai kawasan penyangga. Pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu malah

berpotensi mengancam pekerjaan masyarakat di sana, menghadirkan bencana, dan konflik sosial. Kesenjangan harapan masyarakat dengan kepentingan pemerintah maupun korporasi pertambangan inilah, akhirnya memantik kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap proyek pertambangan emas tersebut.

Beberapa sosiolog membedakan antara perilaku kolektif dengan gerakan sosial, seperti menurut Spancer (1982: 481) menyatakan bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) dapat didefinisikan sebagai tindakan spontanitas, sifatnya sementara, dan tidak terlembagakan secara kelompok. Sementara gerakan sosial, Locher (2002: 233) menyatakan bahwa gerakan sosial lebih dari sekedar bentuk perilaku kolektif, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: pengorganisir, pertimbangan, dan daya tahan.

Perlawanan masyarakat dalam melakukan gerakan penolakan terhadap pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu sudah mengadopsi beberapa taktik pengorganisir, menggunakan strategi gerakan, dan berlangsung sangat lama, maka peristiwa ini termasuk dalam kategori gerakan sosial. Gerakan sosial juga dapat diartikan sebagai penentangan kolektif oleh sekelompok orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang berkelanjutan dengan pihak elite, pihak lawan, dan pihak penguasa (Tarrow, 1998: 4-5). Pandangan ini dilengkapi oleh Sujatmiko (Triwibowo, 2006: xv) gerakan sosial sebagai suatu bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks

jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi maupun hanya sekedar kampanye bersama.

Kasus Banyuwangi tersebut memperlihatkan tumbuhnya gerakan sosial di daerah-daerah Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa dewasa ini, terutama sejak lahirnya gerakan reformasi 1998, gerakan sosial di Indonesia semakin intens dan massif oleh masyarakat akar rumput. Hal ini dipicu oleh ekspansi proyek pembangunan yang dilakukan oleh korporasi maupun pemerintah, gerakan sosial tersebut biasanya dimotori oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, petani, nelayan maupun warga setempat yang merasakan ketidakadilan dan ancaman perampasan ruang hidup dari keberjalanan proyek pembangunan. Proyek pembangunan itu meliputi industrialisasi, pertambangan ekstraktif, pembukaan perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

Selain di Kabupaten Banyuwangi, gerakan sosial juga tumbuh di daerah lain. Hal ini ditunjukkan dalam gerakan masyarakat Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati maupun Rembang dalam melawan pembangunan pabrik semen, masyarakat yang kecewa atas kinerja bupati petahana yang lebih memihak pembangunan pabrik semen, juga berhasil membuat gerakan dan memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Pati 2017 (Sardini, 2018). Kemudian, peristiwa yang sama terjadi pada gerakan sosial masyarakat Kota Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan, mereka tergabung dalam ‘Gerakan Samarinda Menggugat’ untuk menentang dampak pemberian obral izin

pertambangan batubara yang tumpang tindih antar kawasan padat pemukiman oleh pemerintah daerah, dan berakibat pada lubang-lubang *eks* tambang yang meninggalkan air beracun juga logam berat yang sudah menelan korban di Kota Samarinda (Rahman, 2018).

Pada banyak kasus gerakan sosial yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh industri pertambangan ekstraktif, namun ada pula beberapa gerakan sosial untuk menentang proyek pembangunan. Salah satunya adalah gerakan masyarakat Bali dalam menentang reklamasi Teluk Benoa di Bali Selatan yang berdampak pada bencana ekologis dan kerusakan lingkungan, mereka tergabung dalam organisasi gerakan masyarakat sipil Forum Rakyat Bali Tola Reklamasi atau lebih dikenal dengan ForBali yang dipelopori oleh para aktivis lingkungan, masyarakat adat setempat, Umat Hindu, seniman, juga organisasi-organisasi lainnya yang memulai gerakan sejak tahun 2013 hingga sekarang (Wiranata, 2019).

Sebagian besar gerakan sosial diakibatkan oleh ekspansi proyek pembangunan yang dilakukan oleh korporasi maupun pemerintah daerah, hal ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga membuat pembukaan pertambangan ekstraktif di daerah terjadi secara besar-besaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk mengelola sektor pertambangan. Puncaknya, kewenangan daerah tersebut terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, seperti dalam Pasal 37 disebutkan bahwa bupati atau walikota sebagai pihak pemberi izin usaha pertambangan apabila wilayah

tambang berada di wilayah kabupaten atau kota. Undang-undang ini juga menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) yang merupakan perusahaan pertambangan emas yang menginduk kepada PT Merdeka Copper Gold.

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT Bumi Suksesindo (BSI) resmi memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 hektar. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan utama pada unit bisnis produksi emas dan tembaga pada proyek ‘Tujuh Bukit’ atau sebutan aktivitas pertambangan PT BSI di Gunung Tumpang Pitu. Tudingan mengenai pelanggaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan *open pit mining* (penambangan terbuka) di hutan lindung juga mampu ditepis, ketika PT BSI mendapatkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.826/Menhut–II/2013 yang menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi, luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar. Sejak maupun sebelum PT BSI mendapatkan IUP dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Keputusan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Gerakan sosial menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu sudah kerap terjadi, sebagai bentuk respon kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman pertambangan. Apalagi setelah masyarakat merasakan dampak aktivitas pertambangan, gerakan perlawanan semakin bergejolak.

Jika membaca beberapa fenomena gerakan pasca era reformasi di Indonesia, juga khususnya gerakan masyarakat di Banyuwangi dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Gerakan-gerakan yang terjadi diatas, sudah megadopsi gerakan sosial baru. Menurut Pichardo (Sukmana, 2016), Gerakan Sosial Baru (GSB) atau *New Social Movement (NSM)* secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigma Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*), karakteristik khusus pada GSB dapat dilihat dari empat aspek, yakni: tujuan dan ideologi, taktik, struktur, dan partisipan dari gerakan kontemporer.

Sebagai gerakan sosial baru, gerakan masyarakat dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi yang memiliki tujuan untuk menentang kebijakan pemerintah dalam memberikan izin pertambangan kepada perusahaan pertambangan emas, lengkap dengan taktik, struktur dan partisipan gerakan. Gerakan masyarakat dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu ini sudah mulai bergejolak sejak tahun 2008 pasca pemerintah memberikan izin usaha pertambangan PT Indo Multi Niaga. Kemudian pada era PT Bumi Suksesindo gejolak gerakan sempat pada fase terbesar pada tahun 2015 ditunjukkan oleh Ningtyas (2016: 1), menggambarkan bahwa gerakan sosial dalam bentuk demonstrasi ribuan warga Kecamatan Pesanggaran di lokasi penambangan emas PT Bumi Suksesindo, pada 25-26 November 2015. Warga merusak dan membakar infrastruktur pertambangan hingga perusahaan itu mengalami kerugian sekitar Rp 30 miliar. Demonstrasi itu berujung bentrok antara warga dengan aparat keamanan, yang menyebabkan

beberapa warga terkena tembakan dan dua polisi terluka parah. Aksi itu sebagai akumulasi dari sejumlah aksi protes yang telah berlangsung selama delapan tahun, tepatnya saat perusahaan penambangan emas memulai kegiatan eksplorasinya dan pemerintah memfasilitasi seluruh aktivitas korporasi.

Setelah dinamika tahun 2015, karena gerakan masyarakat belum berhasil mewujudkan tujuannya agar pemerintah mencabut izin usaha pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, dan pemerintah malah semakin solid dengan perusahaan pertambangan emas. Maka, gerakan masyarakat yang dibantu oleh organisasi-organisasi non-pemerintah, aktivis mahasiswa dan lingkungan masih terus berlanjut sampai saat ini. Masyarakat yang sudah mulai merasakan dampak kerugian akibat aktivitas pertambangan, seperti pada kejadian banjir lumpur tahun 2016 yang telah merusak areal sawah warga, pantai hingga laut, semakin menambah gejolak perjuangan masyarakat untuk terus melakukan gerakan penolakan terhadap pertambangan emas.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai dinamika dan konstruksi gerakan sosial dalam menolak pertambangan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Maka dalam penelitian ini, peneliti memberikan judul **“Gerakan Sosial Masyarakat dalam Menolak Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu?
2. Bagaimana konstruksi gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.
2. Memetakan gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan teori gerakan sosial.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah dapat sebagai acuan dalam pembuatan maupun evaluasi peraturan dan kebijakan, agar tidak merugikan masyarakat dan tidak menuai konflik antar pihak yang terlibat.
2. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami peraturan dan kebijakan pemerintah, agar masyarakat juga tidak terpengaruh dan mampu membuat gerakan secara substansial.

3. Bagi perusahaan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi masyarakat sekitar perusahaan, agar perusahaan memahami keresahan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dibaca, diantaranya:

1. Tesis *“Gerakan Masyarakat Menolak Penambangan Emas di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2015”* oleh Ika Ningtyas Unggraini prodi S2 Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016). Penelitian ini berfokus pada penelitian sejarah yang kemudian dihubungkan pada Gerakan Sosial Baru (GSB) dalam gerakan menolak penambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Temuan dan penjelasannya, adalah gerakan sosial baru di Banyuwangi terwujud dalam gerakan masyarakat menolak kehadiran penambangan emas oleh PT Indo Multi Niaga dan PT Bumi Suksesindo. Gerakan ini awalnya dimotori oleh masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, petani, nelayan dan warga sipil lainnya. Gerakan muncul karena kehadiran tambang emas dianggap mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang secara turun-temurun bercorak agraris dan kelautan. Kehadiran tambang emas merupakan buah dari kebijakan pemerintah daerah yang tidak melibatkan publik sejak awal sehingga hanya terkesan memfasilitasi kepentingan korporasi. Kehadiran tambang telah menyebabkan perubahan sosial di masyarakat sekitar yang mempengaruhi

eskalasi gerakan masyarakat, kuat di tahun-tahun awal, melemah, kemudian menguat kembali. Dinamika seperti ini memang menjadi ciri khas gerakan sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

2. Skripsi “Strategi Gerakan Tolak Tambang Emas: Studi Kasus Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi” oleh Wewin Ocardilasari prodi S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga (2018). Penelitian ini dilakukan ketika periode gerakan tahun 2018 yang menekankan pada strategi gerakan penolakan berfokus pada mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh masyarakat dan aktor-aktor gerakan lain yang terkait. Temuan dan penjelasannya, adalah Walhi sebagai organisasi yang berfokus pada lingkungan hidup melengkapi kurangnya sumberdaya warga desa dalam melakukan gerakan penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu. Sumberdaya yang dimaksud disini, adalah adanya kepemimpinan dari Tokoh Masyarakat desa sekitar, pendukung gerakan yang merupakan warga Desa Sumberagung dan Sumbermulyo, asset keuangan yang didapatkan dari iuran sukarela warga Desa, professional yang berbakat diperoleh dari Walhi sebagai sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada lingkungan, serta akses kepada media yang juga diperoleh dari bantuan Walhi, agar kasus ini dapat terpublikasi sehingga mempermudah basis dukungan gerakan tolak tambang emas Gunung Tumpang Pitu.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu oleh masyarakat banyuwangi, aktivis lingkungan, mahasiswa, organisasi non-pemerintah, dan aktor lainnya, menunjukkan bahwa gerakan perlawanan ini masih berlangsung hingga saat ini.

Maka, dalam periode gerakan sebelumnya menjadi penting untuk di cermati sebagai bahan dalam menganalisis perkembangan gerakan hingga saat ini, serta pembacaan-pembacaan gerakan yang akan datang. Namun fokus pada penelitian ini, selain untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dan menganalisis dinamika gerakan saat ini, penelitian ini juga mencoba menguji teori lain mengenai gerakan sosial yang lebih kontemporer dan dianggap relevan dengan keadaan hari ini.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Gerakan Sosial Baru

Rekam jejak teori gerakan sosial sudah dimulai dari serangkaian revolusi yang melanda jajirah Eropa Barat pada akhir abad ke 17 sampai abad ke 19, namun serangkaian revolusi itu masih megadopsi Gerakan Sosial Lama (GSL) atau *Old Social Movement*. Pada periode 1960-an, perkembangan teori gerakan sosial memasuki era baru, para akademisi gerakan sosial mulai mengkritik, merevisi, dan mentransformasikan teori Gerakan Sosial Lama (Klasik dan Neo-Klasik) menjadi lebih modern. Transformasi Gerakan Sosial Lama itu, yakni Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) yang kemudian dijadikan analisis dalam setiap studi gerakan sosial sejak tahun 1970-an hingga saat ini (Situmorang, 2019: 24).

Tradisi Gerakan Sosial Baru (GSB) berawal dari masyarakat Eropa dan Amerika yang mulai memunculkan gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan ada aspek humanis, kultural, dan non-materialistik. Berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama (Klasik dan Neo-Klasik), model Gerakan Sosial Baru tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi yang mempertanyakan anti

kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak tertarik dengan ide revolusi, atau bahkan melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Namun, menurut Singh (Sukmana, 2019: 10) menyatakan bahwa strategi dan tujuan dari Gerakan Sosial Baru memiliki sedikit kesamaan dengan model Gerakan Sosial Lama, yaitu dalam memperjuangkan isu-isu seperti: peningkatan buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas.

Pada dasarnya, Gerakan Sosial Baru bersifat plural dan tidak untuk melakukan revolusi. Bentuk Gerakan Sosial Baru, seperti: gerakan anti-rasialisme, anti-nuklirisme, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, reginoalisme dan etnisitas, kebebasan sipil, hak asasi manusia, perdamaian, dan lain sebagainya.

Teori Gerakan Sosial Baru merupakan suatu pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan gerakan sosial yang sesuai dengan konteks zaman, teori ini menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industri (*post-industrial*) di Amerika Utara dan Eropa Barat. Teori Gerakan Sosial Baru, merupakan sebuah pendekatan yang berakar dari tradisi Eropa Kontinental tentang teori sosial dan filsafat politik sebagai respon terhadap kelemahan Marxisme klasik dalam menganalisis tindakan kolektif (Sukmana, 2016:117).

Sardini (2019) dalam kelas perkuliahan menjelaskan tentang rumusannya mengenai konstruksi Gerakan Sosial Baru yang berguna untuk memetakan sebuah peristiwa gerakan sosial, terdapat lima konstruksi yang dirumuskan, yakni:

- 1) Medan atau area gerakan, Arena bermain Gerakan Sosial Baru tidak terbatas pada sebuah daerah atau regional tertentu, namun hingga melintasi batas antar negara. Jika persoalan yang diangkat bermula di daerah tertentu, namun karena memiliki kesamaan pola dengan isu yang terjadi di daerah lain. Maka, melalui jaringan sosial (*social network*) yang dimilikinya, isu yang bersifat lokal tersebut diangkat dan dikerjakan bersama agen jaringan di daerah atau negara lain dengan dijadikannya sebagai kerangka kerja bersama-sama;
- 2) Struktur gerakan, Tujuan Gerakan Sosial Baru adalah membangun dan membina struktur yang merefleksikan bentuk pemerintah yang diinginkannya. Dalam mewujudkan maksud tersebut, para aktivis Gerakan Sosial Baru memiliki hasrat untuk mengedepankan humanisme universal dalam pengelolaan kelembagaannya dengan mempromosikan adanya regenerasi. Struktur gerakan ini mengakomodasi nilai-nilai sosial yang di praktekkan, *open mind*, akuntabel, desentralitatif, dan non-heirarkis;
- 3) Aktor dan partisipan, Aktor utama Gerakan Sosial Baru adalah para penggagas, sementara para partisipan adalah aktivis berbasis sosial yang pernah dibina berasal dari lintas kategori sosial yang bergerak di sekelilingnya.
- 4) Taktik dan pengorganisasian, Taktik dalam Gerakan Sosial Baru adalah saluran-saluran politik non-formal dengan taktikal destruktif dan dengan mobilisasi orientasi opini publik (*public opinion making and public opinion leading*). Sedangkan organisasi dalam Gerakan Sosial Baru tidak lagi mengikuti pengorganisasian seperti serikat buruh dalam industri atau model

kepartaian tertentu. Namun, Bentuk Gerakan Sosial Baru cenderung sosial atraktif dan dramatis, tindakan ini dirasa lebih efektif dari pada cara-cara revolusioner sebagaimana bentuk gerakan sosial sebelumnya yang menekankan pada aksi-aksi destruktif.

- 5) Tujuan dan ideologi, Gerakan sosial baru tidak mementingkan dasar-dasar ideologi yang kuat dalam seluruh operasinya ketika memperjuangkan sebuah isu yang diusungnya. Ekspresi paling konkret dalam Gerakan Sosial Baru adalah lahirnya agen-agen kontrol sosial, dalam ruang lingkup gerakan yang mempromosikan hak-hak para kaum urban marginal, aktivis lingkungan, kelompok anti otoritarian, anti rasisme, dan lain sebagainya.

McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya berjudul “*Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*”, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang penting dalam mengkaji dan menganalisis tentang kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dalam Perspektif Komprehensif Teori Gerakan Sosial (McAdam, McCarthy, dan Zald, 2004: 2). Ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Struktur peluang-peluang politik dan kendala-kendala yang menghambat gerakan; (2) Bentuk dari organisasi, baik formal maupun informal yang mendukung suatu perlawanan; (3) Proses-proses kolektif tentang interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang menghubungkan antara peluang dan tindakan (aksi). Dalam bahasa sederhana ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Kesempatan politik; (2) Struktur dan mobilisasi sumberdaya; dan (3) Pembingkai.

Maka penelitian ini, menggunakan perspektif komprehensif dari McAdam, dkk., dengan menggunakan ketika faktor-faktor tersebut. Penjelasan ketiga faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1.6.1.1 Peluang-Peluang atau Kesempatan Politik

Teori proses politik tentang gerakan sosial pertamakali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul *Political Proses and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (Locher, 2002: 264). Isilah *the Political Proses Theory* (Teori Proses Politik) seringkali disebut juga dengan istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan Kesempatan Politik) atau *Political Opportunity Struckture* (Struktur Kesempatan Politik).

Menurut Sukmana (2016: 179), Teori Proses Politik memfokuskan kepada faktor-faktor yang dapat memungkinkan gerakan sosial berhasil, faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat dominan.

Fokus dari Teori Proses Politik adalah lebih banyak kepada koneksi politik daripada kepada sumberdaya material. Sebuah gerakan sosial dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua gerakan sosial merupakan perjuangan untuk melawan penindasan sosial dan politik (Sukmana, 2016: 179).

McAdam (Locher, 2002: 265), berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yakni: (1) Kekuatan organisasi; (2) Pembebasan kognitif; dan (3) Peluang-peluang politik. Namun dari ketiga faktor tersebut, peluang-peluang politik merupakan aspek sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Peluang-peluang politik, yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik.

Gerakan sosial bukan suatu ruang kosong, karena gerakan sosial merupakan produk dari lingkungan sosial dan politik sekitarnya. Adanya perubahan dalam sistem, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan sosial. Sistem sosial yang dimaksud disini, adalah dimensi-dimensi kesempatan atau peluang politik untuk menentukan gerakan sosial dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. McAdam kemudian berhasil merumuskan lima dimensi peluang atau kesempatan politik dari penyederhanaan dan penambahan hasil pemikiran para ilmuwan gerakan sosial, yakni: (1) Keterbukaan atau ketertutupan relatif sistem politik; (2) Stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elite yang secara tipikasi mendasari suatu sistem politik; (3) Adatidaknya aliansi-aliansi elite; (4) Kapasitas dan kemungkinan negara untuk melakukan tekanan-tekanan atau represi; dan (5) Proses ekonomi dan politik global dalam mempengaruhi kebijakan tingkat domestik (Sukmana, 2016: 185).

Dari keempat dimensi tersebut dapat dipahami bahwa dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara ketertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi stabilisasi aliansi-aliansi elite juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu instabilitas aliansi-aliansi elite akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi dengan elite juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tidak adanya aliansi dengan elite akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga mempengaruhi terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam melakukan tekanan, semakin besar juga gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat. Dimensi proses ekonomi dan politik global telah mempengaruhi terjadinya pengambilalihan otoritas negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional, banyak pemerintah dan rakyat mereka di berbagai belahan dunia kehilangan kekuasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional mereka. Sehingga fenomena tersebut dapat memicu gerakan sosial, namun secara tidak langsung gerakan sosial harus melawan sistem yang lebih besar (Sukmana, 2016: 185-186).

1.6.1.2 Struktur dan Mobilisasi Sumberdaya

McCarthy (McAdam, dkk., 2004: 141-142) menjelaskan konsep struktur mobilisasi sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi rencana taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan rancangan gerakan sosial, atau pengertian lainnya struktur mobilisasi adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu

gerakan. Terdapat empat dimensi stuktur mobilisasi baik bersifat formal maupun informal, dimana melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam suatu tindakan kolektif. Keempat struktur dimensi struktur mobilisasi tersebut, digambarkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Dimensi Stuktur Mobilisasi

	Non-Gerakan (<i>Non-Movement</i>)	Gerakan (<i>Movement</i>)
Tidak Resmi (<i>Informal</i>)	Jaringan pertemanan; Lingkungan Tempat Tinggal; dan Jaringan Kerja.	Jaringan Aktivis; Kelompok-Kelompok Kesamaan; dan Komunitas Memori.
Resmi (<i>Formal</i>)	Organisasi Keagamaan; Instansi Pemerintah; dan Asosiasi Professional.	Organisasi Gerakan Sosial; Komite-Komite Protes; dan Lembaga-Lembaga Gerakan.

Sumber: McAdam, dkk., (2004: 145).

Teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Mobilization Theory*), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002: 258), dengan memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan, proses tersebut mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. Teori Mobilisasi Sumberdaya lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial.

Menurut Sukmana (2016: 158), setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan, penghasilan dan tabungan, serta sumber-sumber non-material seperti wewenang komitmen

moral, kepercayaan, persahabatan, kemampuan dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Oberschall (Locher, 2002: 206), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang terhubung ke dalam organisasi, bagaimana pengorbanan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan.

Dalam mengembangkan pendekatan mobilisasi sumberdaya, McCarthy dan Zald (Sukmana, 198:2016) menekankan atas perspektif sentral, yakni: *Pertama*, studi agregasi (pengumpulan) sumberdaya (seperti uang dan tenaga kerja) sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan sosial; *Kedua*, dalam upaya agregasi (pengumpulan) sumberdaya maka diperlukan minimal beberapa bentuk minimal organisasi; *Ketiga*, dalam mengkalkulasi (menghitung) tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan ada pengakuan eksplisit akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas di mana suatu gerakan sosial terjadi; *Keempat*, model penawaran dan permintaan terkadang perlu diterapkan untuk mengkaji arus sumberdaya yang bergerak kearah menjauh dari gerakan sosial; dan *Kelima*, ada kepekaan terhadap pentingnya biaya dan manfaat dalam menjelaskan individu dan keterlibatan organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.

McCarthy, Zald dan beberapa penulis lain (Sukmana, 200: 2016), membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumberdaya seperti uang, fasilitas dan tenaga kerja, dan legitimasi. Perspektif mobilisasi sumberdaya juga menempatkan beberapa sumberdaya dalam masyarakat, seperti semua level pemerintahan, yayasan-yayasan, institusi keagamaan, kelompok-kelompok yang

mendukung tujuan gerakan. Maka, pernyataan ini mempertegas bahwa sumberdaya bukan hanya berupa barang atau uang yang berwujud fisik, tetapi juga institusi atau kelompok-kelompok. Selain itu, sumberdaya juga bisa meliputi akses kepada media, dukungan simpatisan, loyalitas kelompok dan anggota, kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor, hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor.

1.6.1.3 Pembingkai

Teori Pembingkai (*Framing Theory*) yang digunakan dalam studi gerakan sosial berasal dari pemikiran Goffman (dalam Sukmana, 2016: 201). Goffman mengartikan proses pembingkai merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna. Selanjutnya di dalam ilmu sosiologi, konsep pembingkai khususnya digunakan dalam studi gerakan sosial dan tindakan kolektif, seperti pernyataan Benford dan Snow (Sukmana, 2016: 202) bahwa aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna untuk konsituen gerakan, pihak lawan, dan pengamat. Para aktor gerakan sosial secara mendalam terlibat dengan media, pemerintah lokal, dan negara, dengan apa yang disebut “politik signifikan”.

Mengacu kepada pandangan Benford dan Snow (Sukmana, 2016: 203) yang menyatakan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian memiliki makna (arti) dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. *Framing* tindakan kolektif juga melakukan fungsi penafsiran dan pemahaman yang dimaksud untuk mobilisasi

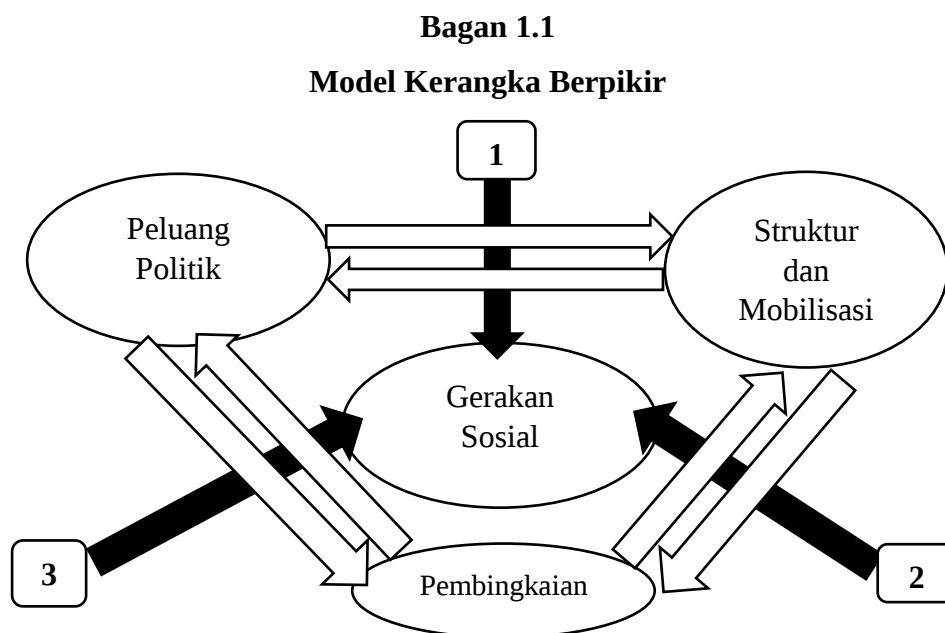
pengikut potensial dan konsituen, untuk menggalang dukungan penonton dan mobilisasi antagonis. Dengan demikian, *framing* tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan, maupun kampanye dari organisasi gerakan sosial.

Proses pembingkai kultural gerakan sosial berkaitan dengan konstruksi identitas partisipan gerakan. Menurut Singh (Sukmana, 2016: 203), teori ini berorientasi pada Identitas secara umum mempunyai sifat-sifat non material dan ekspresif. Teori Identitas membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat aksi. Sementara Teori Pembingkai berfungsi menjawab dan membingkai gerakan sosial beserta produksi-produksi makna dalam gerakan tersebut.

Menurut Snow dikutip Klandermans dan Suzanne (2002), *frame* merupakan *interpretative schemata* yang membuat partisipan dalam menempatkan, menerima dan melabeli suatu hal. Oleh karena itu Klandermans dan Suzanne (2002) berpendapat bahwa *frame* memiliki elemen-elemen yang terdiri dari: (a) *Frame* memiliki konten; (b) *Frame* merupakan struktur kognitif atau skema; (c) *Frame* terdapat pada diri individu maupun lingkungan sosialnya. *Frame* merupakan skema kognitif seorang individu, skema ini berguna dalam membangun aksi kolektif apabila individu tersebut berbagi skema yang dimiliki kepada individu lain yang memiliki skema yang sama dalam suatu aksi yang memiliki suatu pola; (d) *Frame* merupakan struktur kognitif seseorang dan hasil pengembangan proses kognitif. Berdasarkan hal ini, penelitian mengenai *framing*

dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) memandang framing sebagai suatu kegiatan penting dalam mengembangkan pergerakan dengan menyebarkannya melalui *frame alignment processes*; dan (2) memandang *frame* sebagai konten dan struktur, yang mengungkapkan interpretasi partisipan ataupun pemimpinnya mengenai suatu hal dalam suatu waktu; dan (e) *Frame* didasarkan pada teks, *frame* dalam konteks ini dapat ditemukan dalam dokumen tertulis, komunikasi verbal yang terdiri dari percakapan, pidato, slogan, lagu, representasi secara visual yang terdiri dari gambar, ilustrasi kartun dan gabungan dari ketiganya. Sehingga *frame* biasanya dapat ditemukan melalui wawancara partisipan, analisa dokumen, pidato, slogan, dan lagu.

Dari penjelasan kerangka teoritik Perspektif Komprehensif Teori Gerakan Sosial McAdam, dkk., maka selanjutnya dirumuskan model kerangka berpikir (kerangka konseptual) dalam konteks gerakan sosial, seperti dalam Bagan 1.1 dibawah ini:



Sumber: McAdam, McCarthy, dan Zald, (2004).

Dari model kerangka berpikir sebagaimana Gambar 1.1 diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, faktor peluang politik, faktor struktur mobilisasi dan mobilisasi sumberdaya, dan pemingkaian, sama-sama berkontribusi atas kemunculan dan perkembangan gerakan sosial; *Kedua*, faktor peluang politik akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial bila ditopang faktor stuktur mobilisasi dan pemingkaian; *Ketiga*, faktor struktur mobilisasi akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial bila ditopang faktor peluang politik dan pemingkaian; *Keempat*, faktor pemingkaian kultural akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial bila ditopang faktor stuktur mobilisasi dan peluang politik; *Kelima*, analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor peluang politik dan struktur mobilisasi (Angka 1); *Keenam*, analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor struktur mobilisasi dan pemingkaian (Angka 2); dan *Ketujuh*, analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor pemingkaian dan peluang politik (Angka 3).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2011), adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawan eksperimen di mata peneliti adalah eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mencoba menggambarkan sebagai situasi, kondisi, atau berbagai realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri atau karakter tentang fenomena tertentu.

1.7.2 Situs Penelitian

Tempat atau wilayah yang diambil, yakni di Desa Sumberagung maupun desa-desa lain di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Khususnya pada setiap titik daerah konflik pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

1.7.3 Subjek Penelitian

Peneliti akan menjadikan warga setempat di Desa Sumberagung maupun desa-desa lain di Kecamatan Pesanggaran, dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam gerakan sebagai subjek penelitian. Pengambilan narasumber tersebut berdasarkan kebutuhan informasi dari peneliti itu sendiri. Pemilihan Desa Sumberagung menjadi fokus utama, dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat dimana pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu beroperasi. Sedangkan aktor-aktor lain yang terlibat dalam gerakan juga akan menjadi kebutuhan informasi, karena proses gerakan sosial ini juga tidak lepas dari banyak partisipan dari berbagai elemen.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari, instansi, lembaga, badan, dinas atau departemen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, monografi, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggambarkan dua deskripsi dari latar belakang yang berbeda, dan metode lainnya sering disebut dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian metode kualitatif ini adalah dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh, dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, serta dilakukan

secara mendalam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis data mentah, data mentah adalah data yang belum diolah atau masih asli yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data ini didasari pertanyaan bersifat umum, transkrip wawancara, dan dokumentasi
2. Reduksi data, dengan jumlah data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sangat banyak, maka peneliti perlu mencatat secara rinci agar dapat dianalisis segera dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan tema penelitian melalui reduksi data dengan mencari pola-polanya.
3. Membaca data, dalam hal ini, peneliti sudah mendapat gagasan umum dan inti pokok dari hasil yang didapat dari lapangan bersama partisipan dari proses reduksi data. Mulai dengan mencatat hasil kredibilitas dan penuturan informasinya secara jelas.
4. Coding data, memberi kode pada data data yang sudah dirangkum dan disatukan berdasarkan kolom-kolom khusus yang berkaitan dengan tema. Mengkategorisasikan data dalam kategori-kategori tertentu.
5. Membuat deskripsi, menyajikan kembali tema-tema dalam bentuk narasi atau laporan penelitian.
6. Mengtriangulasi, mengecek dan membandingkan data yang sudah dikategorikan dan dideskripsikan satu sama lain berdasarkan narasumber yang berbeda. Dan mencapai penemuan yang diharapkan.

1.7.7 Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
3. Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.